

# Buletin Bappebti

Mengabdikan Dengan Integritas

**Rudy Irawan "Doktor Timah"  
Pertama di Indonesia**

**Potret PBK, SRG dan  
PLK di India**

**Bursa Berjangka di Indonesia  
Sulit Jadi Market Price**

**In House Training  
Dongkrak Capacity Building SDM**



# DAFTAR ISI

Berita Utama.....	4-6
- In House Training Dongkrak Capacity Building SDM	
Resi Gudang.....	7-9
- Potret PBK, SRG dan PLK di India	
Berjangka.....	10-13
- Edukasi PBK Bidik Sektor Pendidikan - JFX Siapkan Perdagangan Fisik Komoditi Teh	
Agenda Foto.....	14-15
Aktualita.....	16-17
- Gudang SRG Bengkulu Bakal Beroperasi Akhir Tahun Ini - JFX Gaet Goldgram Pasarkan Emas Ritel - Ini Alasan BKDI Belum Luncurkan Kontrak Berjangka Timah - Rudy Irawan "Doktor Timah" Pertama di Indonesia	
Analisa.....	18
Breaking News.....	19
Info SRG.....	20-21

## Kiprah...26-27

Boy Hendra

'Chef' Pialang di Saat Kritis



## Forum...22

### Pokja SRG Percepat Implementasi



## Kolom...23-25

### Bursa Berjangka di Indonesia Sulit Jadi Market Price



## Tips 7P

- 1). Pelajari latar belakang perusahaan yang menawarkan transaksi pada anda;
- 2). Pelajari tata cara bertransaksi dan penyelesaian perselisihan;
- 3). Pelajari kontrak berjangka komoditi yang akan diperdagangkan;
- 4). Pelajari wakil pialang yang telah mendapatkan izin dari Bappebti;
- 5). Pelajari isi dokumen perjanjiannya;
- 6). Pelajari risiko-risiko yang dihadapi.
- 7). Pantang percaya dengan janji-janji keuntungan tinggi.



KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

MINISTRY OF TRADE



**buletin**  
**Bappebti**  
BUKTI HARGA & PERDAGANGAN KOMODITI

#### Penerbit

Badan Pengawas Perdagangan  
Berjangka Komoditi

**Penasihat/Penanggung Jawab**  
Sutriyono Edi

**Pemimpin Redaksi**  
Sri Nastiti Budianti

**Wakil Pemimpin Redaksi**  
Taufik K.S

**Dewan Redaksi**  
Subagiyo, Saleh Abich, Himawan  
Purwadi, Yuli Edi Subagio, Annisa F.  
Wulandari, Poppy Juliyanti, Yovian Andri  
P., Tomi Setiawan

**Sirkulasi**  
Apriliyanto, Katimin, Gita Regina  
Napitupulu

**Alamat Redaksi**  
Gedung Bappebti  
Jl. Kramat Raya  
No. 172, Jakarta Pusat.

**www.bappebti.go.id**

*Redaksi menerima artikel ataupun opini  
dikirim lengkap dengan identitas serta foto  
ke E-mail:  
buletin@bappebti.go.id*



Foto : Sekjen Kemendag, Gunaryo, bersama Kepala Bappebti, Sutriyono Edi, dan 10 lembaga terkait membahas pembentukan tim seleksi LP2RG di Gedung Bappebti.

Kementerian Perdagangan melalui Bappebti selaku badan pengawas dan pembina sistem resi gudang- SRG, selangkah telah menyelesaikan kewenangan yang dimiliki di dalam membentuk Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang- LP2RG. Sesuai dengan jadwal yang ditentukan, Tim Seleksi yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Perdagangan No. 1089/M-Dag/Kep/9/2014, tentang pembentukan Tim Seleksi LP2RG telah menjangkau sebanyak delapan perusahaan. Dan dari jumlah itu, ada sebanyak tiga perusahaan yang dinyatakan berhak menjadi bakal calon LP2RG. Masing-masing, PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)- KBI, PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)- Askrindo, dan Perum Jaminan Kredit Indonesia- Jamkrindo.

Sedangkan untuk menetapkan satu dari tiga calon itu, kewenangannya ada di tangan Presiden RI dan dikukuhkan melalui Peraturan Pemerintah- PP.

Pentingnya LP2RG seperti diamanatkan UU No. 9 Tahun 2011, tentang sistem resi gudang, yakni untuk menciptakan kepercayaan dari lembaga keuangan dan para peserta SRG yang menyimpan komoditinya di gudang SRG.

Sebab itu, terbentuknya LP2RG di tanah air digadang-gadang bisa meningkatkan peran serta lembaga keuangan seperti perbankan dan juga pelaku usaha komoditi berorientasi ekspor, dalam meningkatkan kapitalisasi SRG.

Namun melihat dinamika dan agenda politik di tanah air dewasa ini, tampaknya pembentukan LP2RG masih harus bersabar hingga Presiden RI terpilih memutuskan dan menetapkan siapa dari tiga lembaga tersebut yang berhak menjalankan tugas LP2RG.

Pembaca budiman, menyimak laporan Tim Bappebti yang berkesempatan mengunjungi

India untuk mengkaji lebih dalam sinergitas bursa berjangka, SRG dan pasar lelang komoditi, agaknya bisa diterapkan di tanah air.

Seperti disampaikan pada laporan itu, perdagangan berjangka yang diselenggarakan di India hanya dilakukan untuk komoditas pertanian ataupun non-pertanian dengan penyerahan fisik. Sedangkan untuk perdagangan index atau pun option, peraturan pemerintah India dengan tegas melarang.

Di sisi lain dilaporkan, pemerintah India juga mewajibkan bursa berjangka untuk menginformasikan harga yang terbentuk di bursa kepada masyarakat melalui layar ticker yang ditempatkan di pasar-pasar komoditas, maupun melalui website dan siaran TV nasional.

Dan di samping itu, bursa berjangka India seperti National Commodity & Derivatives Exchange Limited- NCDEX hanya mengakui satu jenis Resi Gudang yang dapat diperdagangkan di bursa. Yakni, Resi Gudang Elektronik yang berupa kontrak dan tercatat dalam sistem informasi yang dikembangkan oleh NCDEX. Sedangkan Resi Gudang sebagai surat berharga yang diawasi pelaksanaannya oleh Warehouse Development and Regulatory Authority- WDRRA tidak dapat diperdagangkan di bursa berjangka.

Bercermin dari pengalaman India tersebut, sudah sewajarnya Indonesia bisa mengaplikasikannya. Karena Indonesia tergolong sebagai negara produsen komoditi yang dibutuhkan di berbagai belahan dunia.

Semoga saja di tangan pemerintahan yang akan datang sinergit perdagangan berjangka, SRG dan pasar lelang komoditi menjadi salah satu andalan di dalam peningkatan perekonomian Indonesia.

Salam!



## In House Training Dongkrak Capacity Building SDM

*Peserta inhouse training mengunjungi back office BKDI.*

***Bappebti tingkatkan profesionalisme SDM yang memiliki kemampuan serta keahlian khusus untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan pengaturan di bidang perdagangan berjangka komoditi.***

**D**i Indonesia Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi-Bappebti merupakan regulator tertinggi di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK). Karena itu, Bappebti harus memiliki tenaga-tenaga pengawas yang handal di bidangnya. Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut, Bappebti menggelar kegiatan "In-House Training Kunjungan ke Bursa, Kliring, Perusahaan dan Pialang Berjangka," pada 4-5 September 2014, lalu.

"Kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas para pegawai Bappebti dalam lebih memahami sistem PBK di Indonesia," kata Kepala Bappebti, Sutriyono Edi, dalam sambutannya saat membuka kegiatan tersebut.

Adapun peserta yang menjadi target utama dari kegiatan ini adalah para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan pegawai baru di lingkungan Bappebti.

Pelatihan itu dilakukan selama dua hari dengan dengan mengunjungi langsung kantor pelaku-pelaku usaha di bidang PBK. Di antaranya, kunjungan ke Jakarta Futures Exchange (JFX), Kliring Berjangka Indonesia (KBI), Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI), Identrust Security International (ISI), perusahaan pialang berjangka PT Monex Investindo Futures dan perusahaan pedagang berjangka PT Surya Anugerah Mulia.

### **Mengapa Multilateral Rendah?**

**D**i tengah kunjungan ke bursa berjangka- JFX, para peserta In-House Training mendapat penjelasan mengenai industri dan mekanisme transaksi perdagangan berjangka dari *Research and Development Officer*, JFX, Isa Abiyasa Djohari. Sedangkan mengenai kegiatan operasional di JFX, para peserta



mendapat penjelasan dari *Legal Corporate JFX*, Hendra Parulian.

Setelah para narasumber selesai menyampaikan materinya, para peserta pun melontarkan sejumlah pertanyaan seperti, di bidang PBK apa yang sebenarnya dimaksud dengan pasar yang *liquid*? Dan mengapa di Indonesia transaksi multilateral masih sangat rendah?

Terkait dengan pertanyaan itu, Isa Abiyasa Djohari, menjelaskan, "Dalam PBK khususnya transaksi multilateral, pasar perdagangan komoditi berjangka dapat dikatakan *liquid* jika pedagang dan pembeli mudah untuk keluar masuk pasar (bursa berjangka) dan per harinya transaksi sudah mencapai kurang lebih 2.000 lot," kata Isa.

"Sedangkan transaksi pada perdagangan multilateral masih sangat rendah disebabkan tiga faktor, pertama karena pasar belum *liquid*, kedua profit margin yang diterima juga masih sangat kecil jika dibandingkan dengan perdagangan bilateral. Ketiga, saat penyelesaian serah terima fisik terdapat pajak yang harus dibayarkan," jabar Isa Abiyasa Djohari.

Sementara itu, terkait dengan pertanyaan peserta In-House Training yang menanyakan banyak pengaduan nasabah yang masuk ke Bappebti, Isa Abiyasa Djohari, menjelaskan, seharusnya bursa berjangka merupakan layer pertama yang menerima pengaduan tersebut. "Namun banyak sekali nasabah yang lebih memilih mengadu langsung kepada Bappebti. Hal ini mungkin dikarenakan oleh pengertian banyak nasabah yang menganggap Bappebti sebagai pengawas dan regulator, sehingga lebih dapat dipercaya dalam menangani kasus ketimbang pihak bursa," jelas Isa.

Dalam kaitan dengan perilaku pelaku pasar, Hendra Parulian, menjabarkan secara umum apa perbedaan dari pedagang dan pialang berjangka. Dikatakan Hendra, pedagang berjangka adalah anggota bursa berjangka yang hanya berhak melakukan transaksi kontrak berjangka di bursa berjangka untuk diri sendiri atau kelompok usahanya.



Peserta inhouse training mengunjungi back office JFX.

Sedangkan pialang berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka atas amanat nasabah dengan menarik sejumlah uang dan atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut. "Perbedaan nyata dari keduanya adalah pialang berjangka berhubungan langsung dengan para nasabahnya sedangkan pedagang berjangka tidak," tegas Hendra Parulian.

## Syarat Keanggotaan KBI

Dalam kunjungan di KBI, peserta In-House Training mendapat penjelasan langsung dari Dirut KBI, Tris Sudarto, tentang peran lembaga kliring di industri PBK di Indonesia. Sedangkan mengenai kegiatan operasional KBI diutarakan Diah Yulinda.

Sederet pertanyaan juga dilontarkan para peserta pelatihan, antara lain, dalam melaksanakan fungsi KBI sebagai lembaga penjamin, KBI melakukan *mark-to-market* setiap harinya untuk melihat posisi *margin* dari nasabah, sehingga jika nilai margin sudah kurang dari nilai *maintenance margin*, pihak KBI harus melakukan *collect margin* agar nasabah dapat mempertahankan posisi terbuka. Apa mungkin kegiatan *mark-to-market* ini tidak dilakukan dalam waktu 1 x 24 jam

dan jika terjadi, bagaimana cara mengatasinya?

Menurut Tris, KBI dalam melaksanakan fungsinya menganut prinsip *pre-margining*. Dalam prosesnya, *margin* akan dipungut oleh pialang dari nasabahnya dan kemudian di-*store*-kan ke lembaga kliring berjangka. Lembaga kliring berjangka wajib mengawasi nilai sisa *margin* dari tiap nasabah setiap harinya, 1 x 24 jam, tanpa terkecuali. Sehingga jika nilai *margin* sudah kurang dari nilai *maintenance margin*, nasabah tidak dapat melakukan transaksi.

Jenis *margining* lain adalah *post-margining* yang merupakan metode *margining* dengan prinsip dana jaminan kliring (*covering margin*) di mana kredit akan diberikan pada nasabah sesuai dengan nilai jumlah aset maksimum yang ia miliki. Jenis *margining* ini memang lebih fleksibel sehingga dapat memberikan kemudahan bagi pialang dan menghindari *suspend* bagi nasabah.

"Lalu mengapa KBI lebih memilih metode *pre-margining* dalam melakukan fungsinya? Hal ini dikarenakan kelebihan dari *pre-margining* yang lebih aman (*margin* di bawah nilai minimum maka tidak dapat melakukan transaksi) dan sesuai dengan prinsip pembagian risiko (*risk sharing*) yang baik bagi kedua belah pihak," paparnya.



Peserta inhouse training mendapat penjelasan operasional lembaga kliring dari PT KBI.

Lebih jauh diutarakan Tris Sudarto, kegiatan PBK di Indonesia melibatkan banyak kementerian dalam mekanisme dan pengawasannya. Contoh, jika ada pialang yang bermasalah dalam hal perpajakan maka tidak hanya akan melibatkan pihak Kementerian Keuangan dan perbankan tapi juga Bappebti (Kementerian Perdagangan). Apakah ini adalah metode pengawasan yang sudah tepat? Pada praktiknya terdapat beberapa pialang berjangka, yang merupakan anggota KBI, yang melakukan transaksi melalui anggota kliring berjangka lain. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut?

Tris Sudarto menjawab, dalam industri PBK ini koordinasi antar kementerian tidak dapat dipungkiri sangat diperlukan dalam melakukan pengawasan. Sehingga dirasa perlu sekali memperkuat dan memperdalam kerja sama antar kementerian ke depannya. Untuk kasus yang berkaitan dengan perpajakan, metode penanganannya sudah sangat jelas, yaitu jika tidak membayar pajak maka dana akan diblokir.

"Sebenarnya memang tidak perlu semua pialang atau pedagang berjangka harus menjadi anggota suatu lembaga kliring berjangka tertentu. Kegiatan kliring yang menumpang pada pialang atau pedagang berjangka yang merupakan anggota suatu lembaga kliring sesungguhnya tidak menjadi masalah dan dapat dibenarkan. Hal ini terkait dengan

persyaratan kondisi keuangan yang berat agar dapat menjadi anggota suatu lembaga kliring berjangka sehingga dapat menghalangi pialang dan pedagang berjangka kecil untuk bertumbuh dan berkembang," jelas Tris Sudarto.

Di sisi lain dijelaskan, Diah Yulinda, persyaratan menjadi anggota KBI adalah menjadi pialang atau pedagang anggota bursa berjangka, memiliki izin usaha dari Bappebti sebagai pialang atau pedagang berjangka, lulus wawancara dengan Direksi LKB tentang 5C (*character, capital, capacity, collateral* dan memahami *condition of futures industry*), bersedia mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku, memiliki modal, disetor minimum, sesuai ketentuan yang berlaku, menyetor dana jaminan atau *security deposit* sesuai ketentuan, bersedia membayar uang keanggotaan dan iuran bulanan anggota dan mempertahankan modal bersih disesuaikan.

## Bursa Tidak Menentukan Harga

Di kesempatan mengunjungi BKDI, peserta In-House Training mendapatkan materi tentang Peran Bursa BKDI dalam PBK dari Kepala Pengembangan Produk dan Layanan BKDI, Stella Novita Lukman. Sedangkan sejumlah pertanyaan yang dilontarkan para peserta menyangkut bagaimana dengan harga

komoditi di bursa, bisakah BKDI yang menentukan harga dari setiap produk yang ada?

Menurut Stella, BKDI tidak bisa menentukan harga, mengontrol harga, melakukan intervensi, atau apapun yang berhubungan dengan harga komoditi yang ada di bursa. "Maka kita bisa pastikan ada integritas pasar, berapapun harganya selama kontraknya standar, kualitasnya standar dan penyelesaian kontraknya jelas, maka ketika harga turun atau naik itu di luar dari yurisdiksi atau wewenang bursa," jawabnya.

Ditambahkan Stella, misalkan satu pialang keanggotaannya terdaftar di dua bursa, di BKDI dan di JFX juga ada, lalu bagaimana security-nya? "Kami hanya memantau pialang yang keanggotaannya ada di kami, terlepas pialang tersebut terdaftar di bursa lain, tidak terlalu berpengaruh di kami. Kami menjaga persyaratan yang kami syaratkan ke pialang tersebut, termasuk margin, permodalan dan lainnya," jawabnya. Meski begitu, tambahnya, BKDI juga melakukan komunikasi dengan bursa lain, sehingga terjadi kerjasama yang dapat menguntungkan anggota, misalnya dalam hal margin.

Sementara itu, Direktur Utama PT. ISI, Nursalam, juga memaparkan makalah dengan judul "Peran Lembaga Kliring ISI sebagai Lembaga Kliring Berjangka". Adapun perwakilan PT Monex Investindo Futures, memaparkan makalah dengan judul "Industri Berjangka". Dan, perwakilan PT Surya Anugerah Mulia, memaparkan makalah dengan judul "Pedagang Penyelenggara SPA".

Singkatnya, dengan pelaksanaan kegiatan In-House Training ini, Sutriyono Edi berharap, pengetahuan dan kemampuan bibit-bibit baru di lingkungan Bappebti dapat ditingkatkan. "Sehingga nantinya dapat menghasilkan tenaga-tenaga profesional yang terampil, berkualitas, kompetitif sehingga mampu melaksanakan pengawasan, pembinaan, dan pengaturan dalam keanekaragaman permasalahan pada PBK di Indonesia," tutupnya.



## Potret PBK, SRG dan PLK di India

***Pengantar Redaksi: India merupakan salah satu negara yang telah berhasil mengintegrasikan perdagangan berjangka komoditi (PBK) dengan sistem resi gudang (SRG) dan pasar lelang komoditas (PLK). Terkait itu, medio Mei 2014 lalu, Bappebti menerjunkan Tim ke India guna mengupas sinergi industri PBK, SRG dan PLK. Kelak hal yang sama bisa diterapkan di Indonesia. Berikut ini laporannya.***

Sinergi pemerintah dan bursa berjangka di India memiliki peran penting untuk mengaitkan keberadaan SRG, PBK dan PLK. Walhasil, ketiga instrumen ini saling terintegrasi dan saling menguatkan. Hal itu terungkap dari hasil 6 hari kunjungan kerja (kunker) Tim Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) ke India pada 11 hingga 16 Mei 2014 lalu. Tim itu beranggotakan Pantas Lumban Batu (Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa, sekarang menjabat Kepala Biro Perniagaan); Tomi Setiawan (Kepala Sub Bagian Pembinaan Pelaku Sistem Resi Gudang); dan Bayu Kristanto (Kepala Sub Bagian Pengawasan Penyelenggara dan Pelaku Pasar Lelang).

"Kunjungan kerja dilakukan ke bursa dan *warehouse* terkait SRG, PLK dan PBK di India yang meliputi Gudang *National Collateral Management Services Limited* (NCMSL) di Kadi Gujarat dan Unjha Gujarat, Gudang *Star Agri* di Patan Gujarat, Gudang dan Laboratorium Uji Mutu *Sshree Shubham Logistiscs Limited* (SSL) di Patan Gujarat, Gudang dan Laboratorium Uji Mutu *Sshree Shubham Logistiscs Limited* (SSL) di Patan dan Deesa Guja-

rat, *Commodity Market* di Unjha Gujarat, dan kantor pusat Bursa NCDEX (National Commodity & Derivatives Exchange Limited) di Mumbai," jelas Pantas Lumban Batu kepada **Buletin Bappebti**, September lalu.

Dari hasil perjalanan itu, Pantas menuturkan, penyelenggaraan PBK di India diatur dan diawasi oleh suatu badan di bawah Kementerian Keuangan India bernama *Forward Market Commission* (FMC). PBK yang diselenggarakan di India hanya dilakukan untuk komoditas pertanian ataupun non-pertanian dengan penyerahan fisik. "Peraturan pemerintah di India melarang tegas perdagangan *index* ataupun *option*," katanya.

Sedangkan pajak untuk komoditas pertanian hanya dikenakan untuk komoditas pertanian yang telah diproses atau turunannya seperti *seed oil*. Untuk komoditas pertanian mentah, seperti *wheat*, *jeerah* (*curmin seed*), *caster seed* sama sekali tidak dikenakan pajak. Sedangkan transaksi berjangka untuk seluruh komoditas non-pertanian dikenakan pajak.

Selain itu, Pemerintah India juga mewajibkan bursa berjangka di India untuk



# Resi Gudang

menginformasikan harga yang terbentuk dalam transaksi PBK kepada masyarakat melalui layar *ticker* yang ditempatkan di pasar-pasar komoditas, maupun melalui *website* dan siaran TV nasional. "Informasi harga komoditas yang dikembangkan oleh bursa juga dapat diperoleh masyarakat melalui aplikasi *smartphone* maupun melalui SMS," katanya.

Dia juga bilang, NCDEX hanya mengakui satu jenis Resi Gudang yang dapat diperdagangkan di bursa, yaitu Resi Gudang Elektronik yang berupa kontrak dan tercatat dalam sistem informasi yang dikembangkan oleh NCDEX, disebut dengan COMTRACK. Sedangkan Resi Gudang sebagai surat berharga yang diawasi pelaksanaannya oleh WDRA (*Warehouse Development and Regulatory Authority*) tidak dapat diperdagangkan di bursa.

## Jenis Resi Gudang

**D**i India, terdapat tiga jenis Resi Gudang yang berlaku. Apa saja? *Pertama*, Resi Gudang yang berfungsi hanya sebagai bukti penyimpanan barang di gudang yang dikelola oleh pengelola gudang. "Resi Gudang ini tergolong bukan surat berharga, *non-negotiable*, yang tidak dapat diperdagangkan namun dapat memperoleh pembiayaan dari bank dengan skema *Collateral Management Agreement (CMA- Perjanjian Pengelolaan Agunan)*," terang Pantas.

*Kedua*, Resi Gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang yang telah diakreditasi oleh NCDEX. Resi Gudang jenis ini adalah tanpa warkat (elektronik), tidak termasuk surat berharga namun dapat diperdagangkan di pasar spot dan dapat menjadi *Physical Delivery* pada perdagangan berjangka di Bursa NCDEX. "Pengalihan kepemilikan tercatat melalui sistem informasi yang disebut COMTRACK. Resi Gudang jenis ini hanya dapat diterbitkan oleh pengelola gudang, dan memperoleh pembiayaan dari bank, yang telah bekerjasama atau diakreditasi oleh NCDEX," katanya.

*Ketiga*, Resi Gudang yang berfungsi

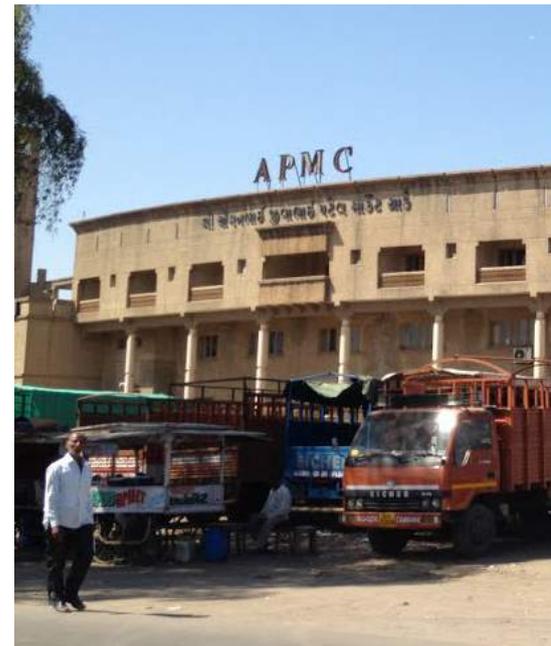
sebagai surat berharga yang diterbitkan oleh pengelola gudang yang telah mendapatkan sertifikat dari WDRA, sebuah lembaga pemerintah di bawah Kementerian Pertanian India yang bertugas untuk mengawal pelaksanaan *Warehousing (Development and Regulation) Act 2007*, mengawasi pelaksanaan Resi Gudang sebagai surat berharga dan mendorong tumbuhnya bisnis pergudangan di India.

Lebih lanjut Pantas mengatakan, Resi Gudang sebagai surat berharga hanya dapat diterbitkan oleh pengelola gudang yang telah mendapat persetujuan dari WDRA. Resi Gudang tersebut dapat dijadikan agunan di seluruh bank yang berada di India dengan nilai kredit maksimal sebesar 70 % dari nilai komoditi dan suku bunga sebesar 4 % (subsidi bagi petani) dan 11 % (non-subsidi atau komersial). Resi Gudang jenis ini dapat dialihkan dan diperdagangkan secara langsung ataupun melalui pasar lelang namun tidak melalui bursa.

"Kelembagaan yang menerbitkan Resi Gudang sebagai surat berharga mempunyai perbedaan dengan yang ada di Indonesia di mana peran pusat registrasi langsung diambil alih oleh pengelola gudang," katanya. WDRA sebagai badan pengawas melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan pengelola gudang yang dapat menerbitkan Resi Gudang, meliputi kelengkapan dokumen, kekayaan bersih maupun fasilitas gudang yang dimiliki.

Apabila dinilai memenuhi ketentuan, maka WDRA akan menerbitkan Sertifikat Pendaftaran Gudang dan menyerahkan buku blanko Resi Gudang. Setiap transaksi Resi Gudang jenis ini akan dilaporkan oleh pengelola gudang secara mingguan ke WDRA melalui e-mail. "Bukan melalui sistem informasi sebagaimana di Indonesia," ungkapnya.

Adapun pengawasan terhadap pengelola gudang dilakukan secara reguler dan sewaktu-waktu oleh otoritas yang terkait dengan jenis Resi Gudang yang diterbitkannya. Apabila pengelola gudang dapat menerbitkan Resi Gudang sebagai surat berharga, maka pengawasan



akan dilakukan oleh WDRA. Sedangkan apabila Resi Gudang NCDEX yang diterbitkan, maka pengawasan pengelola gudang akan dilakukan oleh tenaga inspektor atau pengawas NCDEX. "Lingkup pengawasan dilakukan berdasarkan pada pemenuhan ketentuan SOP pengelolaan barang, kondisi fisik gudang, hingga kuantitas dan kualitas barang," ujarnya.

Untuk pengujian mutu komoditas yang disimpan di gudang dengan penerbitan Resi Gudang NCDEX maupun WDRA dilakukan pada saat barang masuk pertama kali untuk disimpan di gudang, saat barang disimpan di gudang, dan saat penyelesaian transaksi yaitu ketika barang dikeluarkan dari gudang (opsional).

"Tenaga inspektor hanya bertugas melakukan pengambilan sampel komoditas, sedangkan penilaian kualitas komoditas dilakukan oleh dua laboratorium yang telah ditunjuk. Apabila terjadi perbedaan, maka hasil dengan nilai terendah yang akan diakui sebagai kualitas barang tersebut," jelasnya.

Pengelola Gudang, lanjut Pantas, dinilai bertanggung jawab penuh terhadap kualitas dan kuantitas. Selain itu, di India tidak mengenal *Indemnity Fund* (dana ganti rugi), tapi perlindungan ter-



hadap wanprestasi pengelola gudang dilakukan melalui mekanisme Asuransi Barang dan Garansi Bank.

Adapun Resi Gudang yang diterbitkan oleh NCDEX hanya berlaku untuk barang yang memenuhi ketentuan pada kontrak yang diperdagangkan oleh NCDEX yang meliputi jenis, kualitas dan kuantitas. Apabila ternyata barang yang akan disimpan dalam gudang tidak memenuhi jenis maupun minimal kuantitas dan kualitas barang, maka barang tersebut tidak bisa disimpan dalam gudang.

"Untuk pelaksanaan Resi Gudang melalui NCDEX, tetap berada di bawah pengawasan *Forward Market Commission (FMC)* yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan India," jelas Pantas.

## Jenis PLK

PLK di India diselenggarakan berdasarkan peraturan Pemerintah Negara Bagian. Terdapat dua jenis penyelenggaraan PLK. Pertama yang diselenggarakan oleh *Agriculture Product Marketing Committee (APMC)*, sebuah institusi di bawah pemerintah negara bagian yang bertugas menyelenggarakan PLK. Kedua, PLK yang diselenggarakan oleh bursa atau dikenal sebagai Pasar

Spot dengan penyerahan tidak lebih dari 11 hari.

Untuk mengelola pasar spot, NCDEX membentuk anak perusahaan bernama NCDEX Spot Exchange (NSPOT), di mana seluruh sahamnya dimiliki oleh NCDEX. "Komoditas yang diperdagangkan pada pasar spot sangat bervariasi mulai dari komoditas pertanian maupun non-pertanian dan umumnya berkorelasi dengan komoditas yang diperdagangkan di bursa komoditas berjangka," terang Pantas. "NSPOT beranggotakan petani, pedagang maupun pabrikan atau processor," sambungnya.

Untuk biaya yang timbul pada penyelenggaraan PLK, hanya dikenakan kepada pihak pembeli yang umumnya adalah pedagang. Sedangkan penjual yang umumnya adalah petani tidak dikenakan biaya apapun. Walaupun bersifat spot, namun penyelenggaraan PLK di India tetap memerlukan jaminan (margin), yaitu untuk penjual berupa barang yang akan dijual (dibawa ke pasar dan atau disimpan di gudang). Sedangkan bagi pembeli adalah 15 % dari perkiraan transaksi yang akan dilakukan. Dana tersebut disetorkan melalui bank yang telah bekerjasama dengan penyelenggara PLK.

Pantas juga menceritakan, pada saat barang masuk ke pasar spot, NSPOT akan meminta laboratorium yang telah ditunjuk untuk melakukan uji mutu. Apabila pada saat penyerahan barang terdapat perbedaan mutu dari kontrak yang telah disepakati, maka akan diterapkan diskon atau premium berdasarkan kontrak yang disepakati. "Diskon dan premium akan berlaku untuk kualitas dan tempat penyerahan," katanya.

Pasar lelang juga didukung oleh sistem COMTRACK yang memungkinkan pembeli melakukan transaksi melalui komputer. Selain itu, COMTRACK juga dapat menyediakan informasi harga yang terjadi pada pasar lelang untuk dijadikan sebagai acuan harga pada Resi Gudang ataupun pasar komoditas lainnya.

## Berkaca dari India

Dari hasil kunker itu, menurut Pantas Lumban Batu, ada beberapa hal yang dapat dilakukan Bappebti untuk mengembangkan implementasi SRG, PLK, dan PBK di Indonesia.

Dia mengatakan, jika mengacu kepada India, maka persyaratan utama untuk mengintegrasikan SRG dan PBK adalah kesamaan jenis komoditi, volume minimal dan spesifikasi mutu bagi komoditi pada kontrak di PBK dan persyaratan komoditas yang dapat disimpan di gudang dalam SRG. "Hal ini dapat diujicobakan untuk beberapa komoditas unggulan Indonesia," katanya.

Selain itu, pengembangan produk kontrak berjangka harus dilakukan dengan memperhatikan kesamaan produk dan kualitas dengan produk pada SRG dan PLK. Sedangkan untuk mendukung integrasi transaksi komoditas pada PBK, SRG dan PLK, diperlukan adanya dukungan teknologi sistem informasi yang dapat memudahkan bertukar data dan informasi di ketiga bidang tersebut. "Seperti halnya COMTRACK yang dikembangkan NCDEX di India," tegasnya.

Di sisi lain, sosialisasi PBK perlu terus dilakukan kepada masyarakat luas, sehingga PBK tidak lagi dipandang sebelah mata, dan dapat menjadi hal umum bagi para pelaku usaha di bidang komoditas, baik pabrikan atau pun processor, pedagang maupun petani.

Dia juga menyarankan, untuk mendorong tumbuhnya transaksi PBK di Indonesia, bursa berjangka di Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan NCDEX di berbagai komoditas pertanian. Khususnya, untuk komoditas di mana India sangat membutuhkan namun kemampuan dalam negeri India untuk memenuhinya sangat minimum, sedangkan Indonesia memiliki tingkat produksi yang cukup tinggi.

"NCDEX sangat mengharapkan kerjasama ini dapat terjalin, seperti salah satunya untuk komoditas *Palm Oil*," ungkap Pantas. 



## Edukasi PBK Bidik Sektor Pendidikan

Wakil Rektor IPB Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M. Ec., menyampaikan sambutannya dalam sosialisasi PBK.

***Dunia pendidikan menjadi kunci menciptakan pelaku usaha PBK yang berkualitas dan handal di masa mendatang.***

Lebih dari 200 mahasiswa dari 20 perguruan tinggi (PT) se-Jabodetabek antusias mengikuti sosialisasi perdagangan berjangka komoditi (PBK), di Auditorium Andi Hakim Nasution, Institut Pertanian Bogor (IPB) Dramaga Bogor, Kamis, 11 September 2014, lalu. Dalam acara bertajuk "Commodity and Derivatives Exchange Competition" itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menggandeng Fakultas Ekonomi Manajemen IPB serta dua jurusan lainnya yakni Jurusan Agribisnis, dan Jurusan Statistika.

"Di era globalisasi seperti sekarang ini, mahasiswa perlu dibekali wawasan perdagangan berjangka komoditi yang kini semakin banyak diminati pelaku perdagangan dunia," tegas Kepala Bappebti, Sutriyono Edi dalam sambutannya saat

membuka acara tersebut.

Karena itu, Sutriyono mengajak para peserta untuk mengetahui seluk-beluk PBK sekaligus mensimulasikan cara berbisnis melalui bursa berjangka. Dia berharap, kegiatan ini mampu memberi citra positif terhadap industri PBK. Peralpnya, selama ini, industri PBK cenderung negatif di mata masyarakat. "Diharapkan mahasiswa juga bisa berperan secara aktif menyusun strategi dalam perdagangan komoditi dunia karena sudah memiliki wawasan PBK," ujarnya.

Dalam beberapa tahun ke depan, dia juga berharap agar mahasiswa dapat mengambil peran sebagai investor, ahli komoditi, ahli di bursa dan kliring berjangka, dan berbagai peran lain di dalam industri perdagangan berjangka.

Dia juga bilang, PBK sangat strategis dalam perekonomian nasional di era per-



dagangan bebas saat ini karena peranan PBK adalah sebagai sarana lindung nilai (*hedging*) dan pembentukan harga (*price discovery*), serta investasi alternatif yang sangat diperlukan bagi pelaku usaha untuk melindungi usahanya.

## MEA 2015

Menjelang implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di tahun 2015, Sutriyono mengatakan, semua pihak sudah harus mempersiapkan diri dan jeli melihat peluang dan tantangan yang ada.

"MEA membuka pasar yang sangat luas, yaitu pasar ASEAN yang mencapai 600 juta orang, sehingga diharapkan arus investasi juga mengalir ke dalam negeri dan menciptakan *multiplier effect*," tuturnya.

MEA, lanjutnya, harus dilihat sebagai peluang untuk meningkatkan perekonomian nasional, pendapatan negara, dan pengembangan pasar, khususnya untuk pasar komoditi utama seperti kopi, kelapa sawit, kakao, dan karet.

Berdasarkan data dari *World Economic Forum* (WEF), daya saing Indonesia tahun 2013-2014 melonjak tajam dari urutan ke-50 menjadi urutan ke-38. Kenaikan peringkat tersebut, menunjukkan bahwa Indonesia semakin mampu bersaing dengan negara lain. Sebabnya, pasar semakin terbuka dan semakin mudah melakukan investasi yang didukung dengan perangkat hukum yang dapat menjamin keamanan berinvestasi di Indonesia.

Sutriyono melihat, ekonomi Indonesia saat ini merupakan salah satu faktor kunci utama pertumbuhan pasar dunia. Pencapaian Indonesia dalam mengantisipasi dan melewati krisis keuangan global cukup luar biasa. Berdasarkan data *World Economic Outlook 2011*, *International Monetary Fund* (IMF) memproyeksikan Indonesia akan mencapai pertumbuhan tercepat ke-2 di antara 18 ekonomi terbesar dunia selama 2009-2015.

Dari sisi kacamata Sutriyono Edi, industri PBK Indonesia masih memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi acuan



harga dunia. Hal itu karena Indonesia memiliki banyak sumber daya alam, baik yang terbarukan seperti produk pertanian seperti kakao, kopi, dan minyak sawit mentah serta tidak terbarukan dari komoditi pertambangan dan mineral seperti emas, timah, batu bara, nikel, dan bauksit. "Tapi, potensi tersebut belum sepenuhnya optimal dikembangkan, karena masih cukup banyak komoditi andalan ekspor yang belum menjadi subjek kontrak berjangka di bursa berjangka."

"Saat ini banyak sekali komoditi ekspor Indonesia yang diperdagangkan di bursa berjangka luar negeri. Oleh karena itu, diharapkan bursa berjangka di Indonesia bekerja keras menciptakan subjek kontrak berjangka agar harga yang tercipta di bursa dapat menjadi acuan harga dunia bagi perdagangan komoditi," imbuh Sutriyono.

Sekedar informasi, edukasi PBK yang dikemas dalam CEC- *Commodity and Derivatives Exchange Competition* itu, merupakan acara yang baru pertama kali diselenggarakan. Tapi bicara edukasi PBK di perguruan tinggi, Bappebti bersama bursa berjangka, dan pelaku usaha PBK lainnya telah lama melakukannya. Salah satunya yakni mendirikan pojok bursa berjangka di lingkungan kampus.

## Turun 12,56 %

Kepala Biro Hukum, Sri Hariyati yang juga menjadi narasumber dalam acara itu, menambahkan, selama periode Januari hingga Juli 2014, nilai transaksi PBK mengalami penurunan sebanyak 12,56% atau menjadi Rp 48,13 triliun, dibandingkan tahun 2013 pada periode yang sama, yaitu sebanyak Rp 55,04 triliun.

"Penurunan yang terjadi dikarenakan investor masih menunggu kepastian situasi politik dan keamanan di Indonesia menjelang pelantikan Presiden RI yang baru, serta kecenderungan tren perekonomian global yang mengalami penurunan," terangnya.

Di sisi lain, dia juga memaparkan kelembagaan pelaku usaha PBK yang telah mendapatkan izin dari Bappebti. Hingga saat ini, ada 2 Bursa Berjangka (BBJ dan BKDI), 2 Lembaga Kliring Berjangka (KBI dan ISI); 7 Bank Penyimpan Margin yang terdiri dari Bank Niaga, BCA, BNI, Bank Windu, Bank Sinarmas, Standard Chartered Bank, dan Bank Mandiri; 70 Pialang Berjangka; 2.303 Wakil Pialang Berjangka dan 255 kantor cabang Pialang Berjangka, 105 Pedagang Berjangka; 60 Peserta Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) dan 16 Penyelenggara SPA; serta 2 Pialang Penyaluran Amanat Luar Negeri (PALN). 



## JFX Siapkan Perdagangan Fisik Komoditi Teh

*Dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, industri teh di dalam negeri bakal memasuki babak baru. Pelaku teh dapat bertransaksi secara online di JFX. Mekanisme perdagangan fisik komoditi teh ini, digadang-gadang mengembalikan masa kejayaan industri teh Indonesia.*

Merosotnya kinerja industri teh di dalam negeri menjadi salah satu alasan bagi para pelaku untuk mewujudkan perdagangan komoditi teh yang fair dan transparan, melalui mekanisme perdagangan fisik di bursa berjangka. Untuk tujuan tersebut, pada Senin, 1 September 2014, lalu, sejumlah pedagang teh yang tergabung di Asosiasi Pedagang Teh Indonesia- Aspegtindo, menggandeng Jakarta Futures Exchange- JFX dalam sebuah nota kerjasama.

Menurut Sekjen Aspegtindo, Andrew Supit, kepada **Buletin Bappebti**, mengatakan, kapitalisasi industri teh di dalam negeri masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara produsen teh lainnya. "Berdasarkan catatan Kementerian Perdagangan, kapitalisasi industri teh di dalam negeri pertahunnya hanya berkisar US\$ 180 juta. Pada hal dalam hitungan kami selaku pedagang teh, kapitalisasi industri teh di Indonesia berkisar

US\$ 800 juta hingga US\$ 1 miliar."

"Itu artinya bahwa perdagangan teh di dalam negeri belum tertata dengan rapi dan potensi bisnisnya masih sangat besar," kata Andrew.

Bandingkan dengan Amerika Serikat yang notabene tidak memiliki pohon teh, tetapi perdagangan teh bisa mencapai US\$ 25 miliar pertahun, tambah Andrew.

"Sebab itu kami berupaya agar komoditi teh bisa diperdagangkan melalui mekanisme pasar fisik di JFX. Dan jika hal itu bisa diwujudkan, maka Indonesia merupakan negara pertama di dunia yang memiliki pasar fisik teh. Manfaat lainnya dari pasar fisik teh tersebut, pelaku teh baik dari luar negeri maupun domestik dapat melakukan penawaran secara terbuka di JFX," jelas Andrew.

Lebih jauh dikatakan Andrew, dengan transparansi perdagangan teh di JFX, maka akan tercipta harga yang kompetitif dan dapat dijadikan acuan para petani teh.

"Aspegtindo berharap dengan adanya pasar fisik teh menjadi stimulus bagi petani dan berkembangnya industri teh di dalam negeri. Sebab saat ini posisi Indonesia berada di urutan ke delapan sebagai produsen teh di dunia. Pada hal, sekitar 20 atau 30 tahun lalu, Indonesia merupakan urutan ke dua atau ke tiga sebagai produsen teh dunia," imbuh Andrew Supit.

### Peluang

Dirut JFX, Sherman Rana Krishna, yang bertindak mewakili JFX dalam kerjasama dengan Aspegtindo, itu juga ikut berkomentar, "perjalanan teh untuk masuk bursa masih panjang. Setelah MoU ini, kami- JFX dan Aspegtindo akan intensif mengadakan pertemuan untuk berkoordinasi. Selanjutnya kedua belah pihak meminta persetujuan prinsip dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

"Tentunya setelah mendapat



persetujuan prinsip dari Bappebti, kedua belah pihak akan menyusun peraturan tata tertib perdagangan fisik komoditi teh di JFX. Kalau peraturan tata tertib itu sudah siap, lalu kami akan meminta Bappebti untuk mengkaji dan mengesahkannya, serta memberi izin persetujuan perdagangan fisik komoditi teh," jelas Sherman.

Jadi, prosesnya yang harus dilalui cukup panjang, tambah Sherman. "Kalau tidak ada kendala berarti, kira-kira enam bulan ke depan kita sudah siap perdagangan komoditi teh di JFX."

Lebih jauh diutarakan Sherman, selama ini komoditi teh belum dilirik untuk diperdagangkan di JFX. Namun dengan melihat pemaparan Aspektindo terkait potensi komoditi teh, peluangnya cukup besar diperdagangkan baik secara fisik- maupun dengan mekanisme perdagangan berjangka.

"Dengan masuknya teh ke bursa, maka transaksi JFX akan lebih likuid. Nantinya pun harga yang terbentuk dari bursa akan menjadi harga acuan teh di dalam negeri," tegas Sherman.

## Resi Gudang Teh

**D**irut PT Equilibrium Komoditi Berjangka (EKB), Rico Menayang, mengapresiasi upaya Aspektindo mengangkat komoditi teh sebagai subjek komoditi yang diperdagangkan melalui bursa berjangka. "Perdagangan komoditi teh melalui pasar fisik di JFX merupakan salah satu upaya mengangkat nilai perdagangan teh Indonesia. Selama ini kita terlena dengan hasil industri teh, sehingga kita lupa bahwa di negeri lain industri teh telah berkembang jauh lebih cepat," kata Rico.

Rico menambahkan, "karena basis saya adalah agroindustri, maka saya berinisiasi agar komoditi teh bisa diperdagangkan di JFX dengan mekanisme pasar fisik online." Menurut mantan Direktur JFX, ini, perdagangan fisik teh di JFX akan di selenggarakan secara multilateral. Artinya, siapa pun bisa mengambil posisi sebagai penjual dan juga sebagai pembeli.

"Karena karakteristik perdagangannya diikuti banyak peserta, maka pasarnya akan transparan dan fair," jelasnya.

Lebih jauh dijabarkan Rico Menayang, diferensiasi perdagangan komoditi teh

melalui bursa berjangka bisa dikembangkan dengan konsep sistem resi gudang-SRG. "Artinya, komoditi teh yang siap dikemas atau pun diekspor, bisa disimpan di gudang SRG. Saat harga komoditi teh cenderung rendah, pemilik resi gudang bisa menjaminkannya ke lembaga keuangan. Tetapi jika harga pasar cukup bagus, pemilik bisa langsung menjualnya di pasar fisik bursa berjangka- JFX."

"Dengan pendekatan SRG tersebut, para petani teh di tanah air yang jumlahnya mencapai 46,3 % bisa mendapatkan modal kerja dari perbankan dengan jaminan resi gudang. Sehingga petani teh memiliki opsi untuk tidak menjual komoditinya di saat harga cenderung rendah," ujar Rico.

Jika kita bisa melakukan itu, tambah Rico, Indonesia akan menjadi yang pertama di dunia dalam mensinergikan pasar fisik teh dengan mekanisme SRG.

"Di sisi lain manfaatnya bagi dunia usaha, khususnya di sektor perdagangan komoditi teh, mendapat jaminan suplai dan pada akhirnya dapat meningkatkan kapitalisasi perdagangan teh Indonesia," tandas Rico Menayang.

## Potret Industri Teh Indonesia

**P**erkembangan areal tanaman teh di Indonesia sejak tahun 2002 terus menurun. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, perkebunan teh hingga tahun 2014 menyusut menjadi 122.206 hektar dan menghasilkan 145.575 ton teh. Dari bentuk dan sifat pengusahannya, perkebunan teh di Indonesia sebagian besar berupa perkebunan rakyat seluas 56.258 hektar (46,3 %), perkebunan negara seluas 38.103 hektar (31,18 %) sementara perkebunan swasta seluas 27.845 hektar (22,79 %).

Produksi teh di Indonesia secara umum dibedakan menjadi dua macam, yaitu teh hijau dan teh hitam. Teh hijau adalah teh yang proses produksinya tidak melalui proses fermentasi, sedangkan teh hitam adalah teh yang dalam proses produksinya melalui proses fermentasi.

Agroindustri teh di Indonesia telah dimulai sejak abad ke-18 dan komoditas teh pernah tercatat sebagai penghasil devisa negara yang cukup penting dalam perekonomian nasional. Akan tetapi, sejalan dengan merosotnya luas areal tanaman, produksi teh Indonesia juga terus mengalami

penurunan.

Total ekspor teh Indonesia pada tahun 2013, mencapai 70,8 ribu ton, dengan harga nilai US\$ 157,5 juta. Sedangkan impor mencapai sebesar 20,5 ribu ton, dengan nilai US\$ 29,3 juta

Sekitar 70 % produksi teh Indonesia diekspor ke berbagai negara, sehingga Indonesia tercatat menjadi urutan keenam eksportir teh dunia setelah Kenya, Sri Lanka, India dan Vietnam. Sedangkan negara tujuan ekspor teh Indonesia adalah Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa.

Menurunnya kinerja industri teh Indonesia dewasa ini terjadi karena belum dapat diatasinya masalah-masalah yang dihadapi, seperti rendahnya produktivitas tanaman karena dominannya tanaman teh rakyat yang belum menggunakan benih unggul, terbatasnya penguasaan teknologi pengolahan produk dan petani belum mampu mengikuti teknologi Good Agriculture Practice (GAP) dan Good Manufacture Process (GMP), serta standar kualitas produk disyaratkan oleh ISO. 



## Sosialisasi SRG di Langkat, Sumut



Sekretaris Bappebti, Sri Nastiti mewakili Kepala Bappebti memberikan arahan sekaligus membuka acara Sosialisasi SRG yang diselenggarakan oleh Bappebti bekerjasama dengan Dinas Perindag Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Selasa (2/9).

Nastiti dalam arahannya menyampaikan harapan besar kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat, Provinsi Su-

matara Utara agar terus berperan aktif dan secara langsung memberikan informasi mengenai SRG, sehingga pembangunan Gudang SRG di Langkat yang beralamat di Dusun VIII, Bandar Meriah, Desa Namu Ukur Utara, Kecamatan Sei Bingai, dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat, khususnya petani/kelompok tani, Gabungan Kelompok Petani (Gapoktan) dan koperasi, pelaku usaha termasuk pedagang, prosesor, serta pabrik.

Kegiatan Sosialisasi SRG di Kabupaten Langkat dihadiri oleh Staf Ahli Bupati Langkat Bidang Pembangunan, Kadis Perindag Kabupaten Langkat, Camat Sei Bingai, Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Pelaku Usaha bidang SRG, Penyuluh Pertanian serta Instansi terkait lainnya. Narasumber dalam Sosialisasi tersebut adalah Kabag Pengawasan SRG Bappebti Kemendag, Kabag Produksi PT Pertani Wilayah Sumatera Utara, Asisten Operasional BRI Kantor Cabang Stabat Kab Langkat, Ketua Koperasi Niaga Mukti Cianjur.

## Seleksi Administrasi Calon Lembaga Pelaksana Penjaminan SRG



Bappebti, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian Hukum dan HAM selaku anggota Tim Seleksi Calon Lembaga Pelaksana Penjaminan SRG melakukan pertemuan di Ruang Rapat Bappebti, Rabu, 10 September 2014.

Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Kepala Bappebti didampingi pejabat Eselon II Bappebti bertujuan untuk melaksanakan penilaian administrasi calon Lembaga Pelaksana Penjaminan SRG dan penandatanganan Berita Acara Penilaian Administrasi.

Ada pun fungsi Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang adalah untuk melindungi hak Pemegang Resi Gudang dan/atau Penerima Hak Jaminan apabila terjadi kegagalan, ketidakmampuan, dan/atau kebangkrutan pengelola gudang dalam menjalankan kewajibannya; dan memelihara stabilitas dan integritas SRG sesuai dengan kewenangannya.



## Pelatihan Teknis Pelaku Usaha PBK di Bali

**B**appebti menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Teknis Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) mengenai transaksi kontrak Berjangka Komoditi (Multilateral) di Hotel Kuta Paradiso,

Bali tanggal 18-19 September 2014. Pada acara itu, Sekretaris Bappebti, Sri Nastiti mewakili Kepala Bappebti memberikan pengarahan kepada para peserta pelatihan teknis. Sementara itu, Kepala Biro Perniagaan Bappebti, Bapak Pantas Lumban Batu memberikan laporan kegiatan pelatihan teknis. Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Utama PT. Jakarta Futures Exchange (JFX), Direktur Utama PT. Kliring Berjangka Indonesia (KBI), Direktur Utama PT. Identrust Security International (ISI), perwakilan dari PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI), dan Ketua Asosiasi Perdagangan Berjangka Indonesia.

Pelatihan Teknis Pelaku Usaha PBK di Bali diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis para pelaku usaha tentang transaksi kontrak berjangka komoditi (multilateral) sehingga dapat mendukung peningkatan transaksi multilateral yang ada di bursa berjangka. Peserta pelatihan teknis pelaku usaha PBK tersebut terdiri dari para kepala cabang dan pegawai Pialang Berjangka di Divisi Commodity.

Pada Pelatihan Teknis tersebut juga dilaksanakan kompetisi trading dengan tujuan memotivasi para peserta pelatihan teknis agar mau mencoba dan belajar menggunakan sistem perdagangan multilateral. Pada akhir acara, dilakukan penyerahan sertifikat secara simbolis oleh Bappebti kepada peserta pelatihan.

## Konsinyering Sistem Perizinan Online PBK



**B**appebti menyelenggarakan kegiatan Konsinyering Sistem Perizinan Online PBK di Hotel Double Tree, Jakarta pada tanggal 3 September 2014. Pada acara tersebut Kepala Bappebti, Sutriyono Edi, memberikan pengarahan sekaligus membuka acara konsinyering. Acara konsinyering tersebut dihadiri oleh Wakil dari Direktorat fasilitasi Ekspor dan Impor sebagai koordinator Unit Pelayanan Perdagangan (UPP) Kemendag dan wakil dari Pusat Data dan Informasi Perdagangan.

Pelaksanaan Konsinyering Sistem Perizinan Online bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam melakukan pengembangan Sistem Perizinan Online PBK dan untuk berkoordinasi dengan pihak terkait (UPP & Pusdata Kemendag) terkait rencana pengintegrasian Sistem Perizinan Online Bappebti dengan sistem perizinan yang ada di UPP Kemendag.

## Gudang SRG Bengkulu Bakal Beroperasi Akhir Tahun Ini



**G**udang SRG Provinsi Bengkulu, yang berlokasi di Desa Tabah Air Pauh, Tebat Karai, Kab. Kepahiang, rencananya akan beroperasi akhir tahun 2014.

"Kami targetkan gudang SRG dapat difungsikan akhir tahun ini. Saat ini pun kami tengah menuntaskan kerjasama

dengan pihak terkait selaku mitra kerja, seperti dengan lembaga penilaian dan surveyor," terang Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, Kab. Kepahiang, Nusa Chandra Detta.

Kerjasama yang dimaksud, tambahannya, merupakan salah satu syarat

untuk mendapatkan izin operasional SRG dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Tahapan memperoleh izin mengoperasikan SRG ini yakni telah terjalannya kerjasama dengan pihak lembaga penilaian dan surveyor," jelas Detta.

Sekedar informasi, gudang SRG ini diperuntukkan untuk komoditi kopi. Hal itu lantaran Kabupaten Kepahiang memiliki perkebunan kopi Robusta terluas di Provinsi Bengkulu yakni 24.017 hektare, disusul perkebunan kopi di Kabupaten Seluma seluas 16.760 hektare.

"Kami harapkan ke depannya, SRG dapat memberikan kontribusi untuk perekonomian masyarakat Bengkulu, khususnya petani," pungkas Detta.

## JFX Gaet Goldgram Pasarkan Emas Ritel

**J**akarta Futures Exchange-JFX bersama Goldgram meluncurkan Kontrak Berkala Emas (KBE) untuk menggarap pasar ritel emas di dalam negeri. Produk emas yang ditawarkan terdiri dari pecahan 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, hingga 100 gram.

Selain memenuhi permintaan pasar akan produk emas yang lebih fleksibel, peluncuran KBE ditujukan untuk meningkatkan likuiditas kontrak berjangka multilateral. Demikian antara lain dikatakan Direktur Utama JFX, Sherman Rana Krishna, baru-baru ini.

"Diharapkan dengan semakin banyak nasabah ritel yang masuk ke dalam transaksi perdagangan berjangka, maka industri perdagangan berjangka komoditi akan semakin likuid," tambah Sherman.

Lebih jauh dijelaskan, produk KBE memadukan unsur-unsur perdagangan kontrak berjangka, kontrak gulir dan perdagangan fisik terorganisir. "Selain ada jatuh tempo, KBE juga melakukan basis harga spot, yaitu satu bulan. Pembeli bertransaksi menggunakan jaminan margin uang. Sedangkan penjual bertransaksi menggunakan jaminan emas batangan, seperti transaksi pasar fisik," katanya.

Menurut Sherman, salah satu keuntungan bertransaksi KBE, investor dapat memiliki emas tanpa harus melunasi nilainya terlebih dulu. Namun ada margin dan bunga yang harus dibayarkan. Kemudian pada akhir bulan saat jatuh tempo,



investor dapat meminta pengiriman fisik apabila margin telah mencapai 100 %. Tapi sebaliknya, jika pada saat jatuh tempo investor tidak ingin memiliki fisik emas, maka investor dapat menjualnya kembali melalui bursa.

"Bagi masyarakat yang bertransaksi KBE dan menginginkan fisik emas di saat jatuh tempo, dapat memperolehnya di PT Pegadaian yang terdapat di 12 lokasi di 11 kota di Indonesia. Seperti di Pegadaian Jakarta, Medan, Pekanbaru, Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, Manado, dan Makassar," ujar Sherman Rana Krishna.



## Ini Alasan BKDI Belum Luncurkan Kontrak Berjangka Timah

Bursa Timah yang diselenggarakan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) sejak 30 Agustus 2013, telah berdampak positif terhadap perkembangan harga timah di dalam negeri. Setidaknya sejak dioperasikan, harga timah di Bursa Timah BKDI terjaga dan paling rendah di kisaran US\$ 21.600 per metrik ton. Sepanjang Januari hingga 11 September 2014, tercatat ada sebanyak 7.808 lot atau sebanyak 39.040 ton timah yang sudah diperdagangkan di Bursa Timah BKDI.

Meski volume perdagangan relatif lebih rendah dibandingkan dengan dari luar negeri, Bursa Timah BKDI sudah diperhitungkan di mata internasional. Hal itu tampak dari pergerakan harga timah di dalam negeri yang selalu berada di atas harga timah internasional.

Dengan pencapaian tersebut, ada sejumlah pihak yang

mengusulkan agar BKDI meluncurkan kontrak berjangka komoditi timah. Namun menurut Komisaris Utama BKDI, Fenny Widjaja, baru-baru ini mengatakan, sampai saat ini belum ada rencana meluncurkan kontrak berjangka komoditi timah. "Usulan itu cukup baik. Tetapi kami menganggap kondisinya belum kondusif bagi BKDI memiliki kontrak berjangka timah. Alasan sederhananya, masih ada gap yang cukup besar antara harga timah di BKDI dengan harga timah di luar negeri," katanya.

Hal itu dikarenakan persediaan timah di bursa luar negeri masih cukup besar, tambah Fenny. Di samping itu, masih ada timah dalam bentuk lainnya atau pun timah ilegal yang mengalir ke luar negeri.

"Kalau nantinya likuiditas transaksi timah sudah tinggi dan harga timah di luar negeri relatif sama dengan di BKDI, baru 'lah kita memikirkan kontrak berjangka timah," kata Fenny Widjaja. 📌

## Rudy Irawan "Doktor Timah" Pertama di Indonesia



Hadirnya Bursa Timah di Indonesia merupakan salah satu motivasi kuat bagi R. Rudy Irawan untuk mengkaji model bisnis tambang timah di Indonesia. Dengan karya ilmiah itu, R. Rudy Irawan, berhasil menyandang gelar Doktor Manajemen Bisnis dari Institut Pertanian Bogor- IPB, pada Program Studi Manajemen dan Bisnis. Keberhasilannya itu diraihinya pada Rabu (24/9/2014), menyelesaikan sidang disertasinya yang berjudul "Model Bisnis

Tambang Timah di Indonesia (Studi Kasus Provinsi Bangka Belitung)."

Di hadapan para penguji, Rudy mengklaim, dirinya merupakan orang pertama yang mengkaji sektor pertambangan khususnya timah, dengan metode manajemen stakeholder, wawancara mendalam, dan Analytic Network Process (ANP). "Model bisnis dan strategi industri tambang timah ini dibentuk dari manajemen stakeholder, wawancara mendalam, dan analisis

ANP. Dari sekian banyak disertasi di Indonesia yang saya amati, belum ada yang membahas tentang pertambangan khususnya timah dengan metode ini," kata Rudy.

Hal senada juga diakui Prof. Dr. Ir. Ujang Sumarwan, MSc., Ketua Komisi Pembimbing disertasi S3 Rudy Irawan yang mengatakan, metode bisnis tambang timah yang dipresentasikan ini tergolong langka.

"Sebab itu diharapkan metode ini bisa dijadikan *raw model* pada bisnis tambang mineral lainnya di Indonesia. Karena, bisnis tambang mineral lainnya pun relatif sama dengan timah," kata Ujang Sumarwan.

Selain Prof. Dr. Ir. Ujang Sumarwan, M.Sc, disertasi Rudy Irawan, juga diuji Dr. Ir. Budi Suharjo, MS, dan Ir. Setiadi Djohar. Di samping itu juga terdapat Penguji Luar Komisi Pembimbing yaitu Dirjen Minerba, Kementerian ESDM, Dr. Ir. R. Sukhyar dan Prof. Dr. Ir. Rizal Syarif, DESS (Guru Besar Teknologi Pertanian, IPB). 📌



## BK CPO Oktober Jadi 0 %

**B**ea Keluar (BK) crude palm oil (CPO) pada bulan Oktober 2014 direncanakan turun menjadi 0 %. Diharapkan dengan penurunan Bea Keluar itu membuat CPO asal Indonesia tetap kompetitif di mancanegara dan mampu bersaing dengan komoditi minyak nabati lainnya.

"Sepertinya BK CPO di bulan Oktober akan lebih rendah, mungkin menjadi 0 % karena harga di pasar internasional sangat rendah," jelas Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi, baru-baru ini.

Dikatakan Bayu, diharapkan dengan penurunan BK tersebut, CPO Indonesia tetap diminati di mancanegara dan kompetitif dengan CPO Malaysia yang sudah sebulan ini menurunkan BK menjadi 0 %. "Saat ini 'kan Malaysia sudah menurunkan BK CPO menjadi 0 %, dan akan berakhir pada bulan Oktober nanti," katanya.

Meski rapat penentuan besaran BK belum dilakukan, Wamendag Bayu Krisnamurthi berspekulasi akan ada penurunan BK CPO menjadi 0 %.

"Kan harga CPO dunia saat ini sangat rendah, bahkan ada yang prediksi di bawah US\$ 750 per metrik ton. Jadi agar CPO kita tetap kompetitif, diturunkan saja BK-nya," ujar Bayu.

Sebagai gambaran, BK CPO yang berlaku saat ini masih berada pada level 9 % sesuai dengan PMK No. 75 Tahun 2012, yang menetapkan ambang batas harga CPO di kisaran US\$ 800 – US\$ 750 per metrik ton. 

## Cuaca Esktrim, Produksi Kopi PTPN XII Anjlok

**A**nomali cuaca berimbas pada tanaman kopi milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XII. Sampai September 2013, produksi kopi perusahaan plat merah ini diperkirakan hanya 3.192 ton atau turun 49,66 % dibandingkan tahun lalu yang mencapai 6.341 ton.

Data PTPN XII menunjukkan, hasil produksi kopi arabika merosot tajam bila dibandingkan dengan produksi kopi robusta. Untuk kopi arabika, sampai September tahun ini, produksinya hanya 1.086 ton atau turun sebesar 62,84 % dibandingkan tahun lalu yakni 2.923 ton. Di samping itu, produksi kopi robusta milik PTPN XII juga turun menjadi 2.106 ton atau turun 38,38 % dibandingkan periode Januari-September tahun lalu yaitu 3.418 ton.

"Supaya memenuhi target penjualan, kami juga menyerap biji kopi rakyat," kata Sugeng Budi Rahardjo, Direktur Pemasaran Perencanaan dan Pengembangan PTPN XII.

Lebih jauh dikatakan Sugeng, PTPN XII saat ini juga tengah mencoba menanam kopi jenis Arabika di beberapa daerah seperti perkebunan teh Gunung Gambir, Kertowono, Bantaran, Wonosari, Sirahkencong dengan luas lahan percobaan masing-masing 10 hektare (ha). Perusahaan merogoh kocek sedikitnya Rp 100 juta per ha untuk pengembangan kopi robusta ini mulai dari penanaman, perawatan hingga panen.

"Tapi produksi dari kebun-kebun *clone* ini belum dipakai untuk dijual sebagai *Java Coffee*," terang Sugeng. 

## Volume Transaksi Bursa Timah BKDI Turun 52,2 %

**B**ursa Timah BKDI pada periode September 2014, menutup perdagangan dengan penurunan volume sebesar 52,2 % menjadi sebanyak 510 lot atau setara 2.550 ton. Sebelumnya pada periode perdagangan Agustus 2014, Bursa Timah BKDI mencatatkan transaksi sebanyak 971 lot, setara dengan 4.855 ton.

Rilis Bursa Timah BKDI di akhir perdagangan bulan September menunjukkan, sepanjang bulan transaksi timah hanya tercatat sebanyak 10 lot untuk jenis TinPB300 dengan harga US\$ 21.630 per metrik ton. Harga timah ini juga merupakan harga terbaik sepanjang periode September 2014.

Dengan transaksi sebesar 10 lot tersebut, sepanjang periode September 2014 para pelaku timah yang tercatat bertransaksi hanya terjadi sebanyak lima kali. Yakni pada tanggal 11 September sebanyak 230 lot, 23 September juga sebanyak 230 lot, 24 September sebanyak 12 lot, 25 September 25 lot dan 30 September sebanyak 10 lot.

Sementara itu, pada periode Januari – September 2014, Bursa Timah BKDI sudah mencatatkan volume transaksi sebanyak 8.088 lot, atau tercatat ada sebanyak 40.400 ton timah siap ekspor ke berbagai negara. 



## Bank Indonesia Launched Currency Hedging Policy

**B**ank Indonesia launched three policies to increase foreign currency hedging transaction on local market.

In regards to the launching, Bank Indonesia has withdrawn six policies that has been used to control foreign currency transaction.

According to Governor of Bank Indonesia, Agus Martowardojo, the new policy will stimulate banking sector to be more active and has no hesitation to do foreign currency hedging transaction.

"This policy's main point is to deregulate currency market that can create public trust," Agus Martowardojo explained.

Moreover it is said that one of the policies will arrange currency loan with foreigner. While the other policy is about protecting currency value. "These three Bank Indonesia's policies are effectively implemented on 17th of September 2014."

Agus said that the low currency transaction on the country is a potential trigger of rupiah exchange value fluctuation while US dollar demand is increased and companies massively buy from overseas.

"The main point is that we want the deepening of domestic financial market to be more liquid. So the financial market has ability to absorb external shocks," Agus Martowardojo explained.



## ICDX Plans Two Tin Bonded Zone

**I**ndonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) is currently planning to realize 2 (two) tin bonded zones, one at Jakarta port area and Balam Port at Bangka Belitung province.

The first step to realize the tin bonded zone plan, is to have Bank Sinar Mas as a partner to do funding for tin at the warehouse or also known as warehouse financing.

The tin financing is given to ICDX tin exchanges member with value of 90% of tin in the warehouse.

"Until today there are 4 tin smelters that have agreement with Bank Sinar Mas to get the warehouse financing," explained the Chief Commissioner of ICDX, Fenny Widjaja recently.

According to Fenny Widjaja, the warehouse financing is very beneficial for smelters. By storing the tin in an accredited warehouse and guaranteed by a clearing house, smelter can get fund of 90% from tin value.

For sure with this kind of funding, smelter's cashflow will not be interrupted, especially when tin price is low.

"From the Bank side, tin commodity was seen as a high value commodity, non perishable, and can be traded anytime. Moreover the price markdown at ICDX tin exchanges is not more than 5%. That is why bank is convinced to give funding of 90% within 1 year period," Fenny explained.

"This plan is already ongoing. We hope in 2015, the tin bonded zone can be accomplished with the support from Jokowi-JK government. These 2 bonded zones are planned to be at Jakarta Port and Balam Port, Bangka," Fenny Widjaja emphasized.

## M. Lutfi, the Minister of Trade: "ASEAN and Indonesian economy were developed progressively"

**A**SEAN Economic Ministers (AEM) ensures that ASEAN region will become the new investment opportunity for international world and the current Indonesian economic condition is very conducive for new investment.

This was one of the topic that was discussed by the Minister of Trade, M.Lutfi to US business people during AEM meeting at Nay Pyi Taw, Myanmar on early September.

"ASEAN will grow progressively in the coming years with its potential market.

ASEAN is a single market that can be a production base used by the international business as platform. Moreover ASEAN can be a place to develop the global value chain," Lutfi explained.

Furthermore the Minister of Trade said "Indonesia has a very big economic power source potential and nowadays investment licenses are easier to obtain."

Meanwhile, the highlighted issue on the AEM meeting came from US business in regards to Indonesian government policy.

Some of the highlighted issues are related with Regulation of The Minister of Trade No 70 Year 2013 and the impact on US investment, e-commerce, services sector, and infrastructure in ASEAN.



## PENERBITAN RESI GUDANG BULAN SEPTEMBER 2014

		Penerbitan				
NO.	Pengelola Gudang/Gudang	Komoditi	Jumlah Resi Gudang	Jumlah Komoditi (Ton)	Harga (Rp/Kg)	Nilai Barang (Rp)
1.	<b>PT. Pertani (Persero)</b>					
	- Sidrap (Maritengae)	Gabah	4	646	4.500	2.905.875.000
	- Pinrang (Watang Sawito)	Gabah	2	310	4.500	1.395.225.000
2.	<b>PT. BGR (Persero)</b>					
	- Aceh Tengah (Bebesan)	Kopi	1	5	40.000	204.000.000
3.	<b>Koperasi Niaga Mukti</b>					
	- Cianjur (Warungkondang)	Gabah	4	105	6.242	657.260.000
4.	<b>PT. Pos Indonesia (Persero)</b>					
	- Tasikmalaya (Jamanis)	Gabah	4	50	5.000	250.000.000
5.	<b>KUD Tuntung Pandang</b>					
	- Barito Kuala (Marabahan)	Gabah	6	67	6.000	404.706.000
<b>Jumlah</b>		<b>Gabah</b>	<b>20</b>	<b>1179</b>	<b>5.248</b>	<b>5.613.066.000</b>
<b>Total</b>		<b>Kopi</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>40.000</b>	<b>204.000.000</b>
			<b>21</b>	<b>1.184</b>		<b>5.817.066.000</b>

Sumber : BIRO PASAR FISIK DAN JASA, BAPPEBTI

## PEMBIAYAAN RESI GUDANG BULAN SEPTEMBER 2014

		Penerbitan			Pembiayaan		
NO.	Pengelola Gudang/Gudang	Komoditi	Jumlah Resi Gudang	Nilai Barang (Rp)	Jumlah Resi Gudang	Nilai (Rp)	Bank/LKNB
1.	<b>PT. Pertani (Persero)</b>						
	- Sidrap (Maritengae)	Gabah	4	646	3	1.570.000.000	BRI
	- Pinrang (Watang Sawito)	Gabah	2	310	2	950.000.000	BRI
2.	<b>PT. BGR (Persero)</b>						
	- Aceh Tengah (Bebesan)	Kopi	1	5	-	-	-
3.	<b>Koperasi Niaga Mukti</b>						
	- Cianjur (Warungkondang)	Gabah	4	105	4	459.602.000	Bank BJB
4.	<b>PT. Pos Indonesia (Persero)</b>						
	- Tasikmalaya (Jamanis)	Gabah	4	50	-	-	-
5.	<b>KUD Tuntung Pandang</b>						
	- Barito Kuala (Marabahan)	Gabah	6	67	5	254.000.000	Bank Kalsel
<b>Jumlah</b>		<b>Gabah</b>	<b>20</b>	<b>1179</b>	<b>14</b>	<b>3.233.602.000</b>	
<b>Total</b>		<b>Kopi</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
			<b>21</b>	<b>1.184</b>	<b>14</b>	<b>3.233.602.000</b>	

Sumber : BIRO PASAR FISIK DAN JASA, BAPPEBTI



## NILAI TRANSAKSI PASAR LELANG BULAN SEPTEMBER 2014

NO.	Wilayah	Nilai Transaksi Periode September 2014 (Rp.)	Nilai Transaksi September 2013 (Rp.)	Nilai Transaksi Jan-September 2014 (Rp.)
1.	Sumatera Barat	2.451.205.000	4.472.462.500	17.479.742.500
2.	Jambi	Nihil	3.182.120.000	12.232.241.000
3.	Lampung	Nihil	20.009.100.000	4.998.600.000
4.	Jawa Barat	4.574.300.000	14.826.500.000	54.653.855.000
5.	Jawa Tengah	Nihil	10.655.000.000	89.976.615.000
6.	Yogyakarta	2.595.000.000	8.827.000.000	70.911.700.000
7.	Jawa Timur	41.153.000.000	45.660.000.000	146.432.650.000
8.	Bali	5.997.687.500	1.287.900.000	6.835.437.500
9.	NTB	3.211.575.000	4.128.250.000	28.074.425.000
10.	Sulawesi Utara	Nihil	11.339.350.000	69.709.925.000
11.	Sulawesi Selatan	1.617.000.000	5.500.000	25.716.350.000
12.	Sulawesi Tenggara	1.141.250.000	1.846.500.000	12.372.525.000
13.	Gorontalo	6.145.600.000	4.290.500.000	6.899.600.000
14.	DKI	Nihil	Nihil	7.418.500.000
15.	PT iPASAR Indonesia	Nihil	187.932.000	130.000.000
16.	Pasar Fisik CPO	Nihil	Nihil	Nihil
<b>TOTAL</b>		<b>68.886.617.500</b>	<b>130.718.114.500</b>	<b>553.842.166.000</b>

Sumber: Bappebti

## PENYELENGGARAAN DAN NILAI TRANSAKSI PASAR LELANG SPOT PERIODE JULI 2014

Komoditas	Penawaran September 2014	Transaksi Januari - Sept 2014	
	Kuantitas	Kuantitas	Nilai (Rp)
Jati	0	0	0
Mahoni	0	0	0
Jagung	630.000 Kg	40.000 Kg	130.000.000
Rumput Laut	0	0	0
Kopi	94.000 Kg	0	0
Gondorukem	1.920 Ton	0	0
<b>TOTAL NILAI TRANSAKSI</b>			<b>130.000.000</b>

Sumber: PT iPASAR, data diolah

## Permasalahan dan Tantangan SRG

### Pengantar Redaksi;

Setelah memetakan permasalahan Sistem Resi Gudang (SRG) dan disempurnakannya undang-undang SRG menjadi UU No. 9 Tahun 2011, Kementerian Perdagangan telah menetapkan target pengembangan SRG hingga tahun 2025, sebagai berikut;

### PERMASALAHAN DAN TANTANGAN SISTEM RESI GUDANG

Sistem Resi Gudang belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, petani maupun pelaku usaha sarana tunda jual, sarana pembiayaan perdagangan, sehingga belum dapat menjadi instrumen pemerintah dalam pemantauan ketersediaan stok nasional.

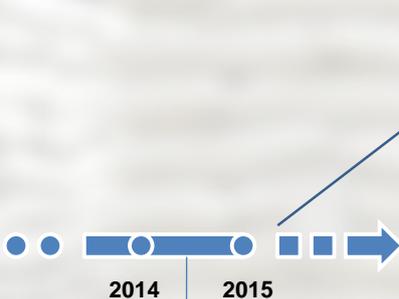


Penerbitan 1.541 resi, 63.532 ton (53.447,78 ton gabah, 5.022,47 ton beras, 4.621,36 ton jagung, 20,39 ton kopi, dan 420 ton rumput laut) dengan total nilai Rp. 316,8 miliar. on-bank sebesar Rp. 192 miliar; Pembiayaan dari lembaga keuangan bank maupun n

Beberapa tantangan yang mendasar :

1. Minimnya ketersediaan lembaga yang dinilai layak dan mampu untuk menjadi Pengelola Gudang
2. Rendahnya dukungan pemerintah daerah untuk pengembangan SRG.
3. Masih terbatasnya cakupan pasar komoditas.
4. Belum terbentuknya Lembaga Penjamin Resi Gudang.

### PENGEMBANGAN SRG JANGKA PENDEK (2014-2015)



Proyeksi total nilai Resi yang diterbitkan sampai periode ini adalah Rp. 571,5 miliar dengan pembiayaan dari lembaga keuangan bank maupun non-bank sebesar Rp. 348,7 milyar;

- Pembentukan dan Optimalisasi Tim Kelompok Kerja SRG
- Melakukan percepatan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Lembaga yang Melaksanakan Fungsi, Tugas, Kewajiban dan Wewenang Lembaga Jaminan Resi Gudang,
- Penyimpanan komoditas unggulan daerah dengan spesifikasi sesuai dengan kontrak pada perdagangan berjangka (Kopi dan Kakao);
- Mempersiapkan calon Pengelola Gudang SRG baru dengan bekerjasama dan melatih BUMN, BUMD maupun Koperasi;
- Melibatkan pelaku usaha aktif ataupun asosiasi komoditas di tingkat daerah maupun nasional;
- Menambah nilai ekonomis komoditi yang disimpan di gudang SRG dengan menambah fasilitas *Rice Milling Unit*.
- Sosialisasi dan Edukasi kepada Pemerintah Daerah, DPRD, Kementerian/Lembaga terkait, Asosiasi Komoditas maupun Pelaku Usaha;
- Mensinergikan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang melalui transaksi Resi Gudang di penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas;



## PENGEMBANGAN SRG JANGKA MENENGAH(2016-2019)

1. Harmonisasi peraturan dan ketentuan yang terkait dengan PBK, SRG dan PLK guna membangun keterkaitan antara ketiga pilar tersebut;
2. Pembentukan Lembaga Jaminan Resi Gudang yang bertugas mengelola Dana Jaminan Sistem Resi Gudang sebagai lembaga yang independen dan berdiri sendiri.
3. Pengembangan Badan Pengawas Sistem Resi Gudang sebagaimana diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2011;
4. Mewujudkan koordinasi antar pemangku kepentingan terkait dengan ketahanan pangan nasional melalui sistem informasi ketersediaan pangan yang terintegrasi.



Proyeksi total nilai Resi yang diterbitkan sampai periode ini adalah Rp. 1,4 triliun, dengan pembiayaan dari lembaga keuangan bank maupun non-bank sebesar Rp. 855,1 milyar;

## PENGEMBANGAN SRG JANGKA PANJANG(2020-2025)

1. Menstimulasi terwujudnya keterkaitan transaksi komoditas fisik di tiga pilar instrumen perdagangan, yaitu PBK, SRG dan PLK;
2. Pengembangan komoditi dalam SRG untuk seluruh komoditas fisik yang diperdagangkan di Bursa, tidak terbatas pada komoditas pertanian;
3. Perluasan jaringan Gudang SRG mencakup gudang-gudang komoditas pokok yang tersebar di seluruh wilayah nusantara sehingga dapat memantau ketersediaan stok komoditas khususnya pangan secara nasional.
4. Sosialisasi dan Edukasi serta penegakan hukum berkelanjutan dalam rangka menjaga integritas dan terus mengembangkan pelaksanaan SRG;



Proyeksi total nilai Resi yang diterbitkan sampai tahun 2025 adalah Rp. 5,8 triliun. Pembiayaan dari lembaga keuangan bank maupun non-bank sebesar Rp. 3,57 triliun;



## Bursa Berjangka di Indonesia Sulit Jadi Market Price

**Kerjasama antara petani, pedagang pengumpul, sampai dengan wholesaler sudah terjalin sedemikian baik, bahkan hubungan akrab tersebut berlanjut hingga ke bursa berjangka luar negeri. Sehingga untuk mengalihkan perdagangan komoditi ke bursa berjangka Indonesia yang berperan sebagai sarana price discovery atau price maker-nya, sangat sulit.**

Fungsi utama bursa berjangka komoditi adalah sebagai sarana lindung nilai dan bukan merupakan sarana transaksi fisik. Meski demikian, perdagangan fisik komoditi yang diselenggarakan bursa berjangka komoditi menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Sebab, menyelenggarakan perdagangan berjangka bukan hanya menyiapkan sarana untuk perdagangan derivatif yang kurang lebih berupa perangkat *electronic trading* beserta perangkat aturannya. Melainkan juga, perlu didukung oleh kesiapan pasar fisik untuk memberikan pelayanan yang efisien dan optimal kepada para pelaku pasar.

Kesiapan pasar fisik tersebut sangat mempengaruhi besaran harga yang terbentuk di bursa berjangka. Semakin efisien pasar fisik yang menjadi *underlying market*, maka akan semakin bersaing harga yang terbentuk di bursa berjangka. Besarnya animo masyarakat terhadap perdagangan berjangka di suatu bursa juga dipengaruhi oleh kesiapan pasar fisik yang dipilih sebagai *underlying market*.

Oleh karena itu, perdagangan ko-

moditi di bursa berjangka kurang diminati jika pasar fisik yang dijadikan acuan harga komoditi tidak representatif dan kurang mencerminkan pasar yang sehat.

Kondisi inilah yang merupakan salah satu penyebab bursa berjangka di Indonesia kurang digemari.

Pasar fisik komoditi di tanah air kurang mencerminkan pasar yang efisien. Hal ini diakibatkan antara lain, tingginya biaya pengangkutan dan *handling*, ketidakpastian waktu bongkar muat, kurangnya kapasitas alat ukur dalam melakukan bongkar muat, banyaknya broker yang kurang memberikan kontribusi dalam proses *handling* namun hanya mencari keuntungan (*rent seeker*).

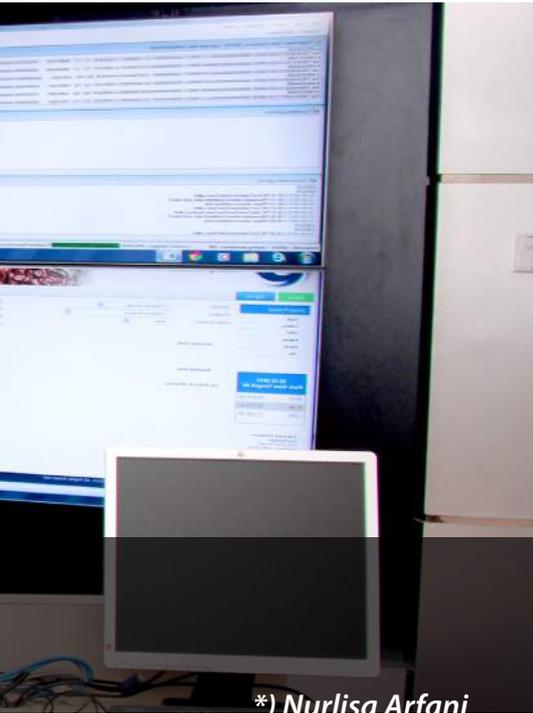
### Country Risk

Faktor lain yang mempengaruhi tingginya harga komoditas Indonesia, antara lain karena besarnya pengaruh dari faktor ketidakpastian pasar- (*market uncertainty*) yang disebabkan tidak stabilnya nilai tukar rupiah, volume pasokan yang tidak kontinu, serta ketidakpastian biaya distribusi barang dan jasa.

Kondisi itu pun turut meningkatkan

posisi Indonesia sebagai *country risk* dalam perdagangan internasional untuk berbagai komoditi pertanian, perkebunan, kehutanan dan pertambangan. Sebab itu, untuk memperoleh komoditi dari Indonesia, pedagang asing cenderung bertransaksi di bursa berjangka luar negeri dibandingkan dengan bursa berjangka yang ada di Indonesia. Meski konsekuensinya para pedagang asing itu akan mengurangi margin yang diperoleh dari harga komoditi yang dibeli. Tetapi di sisi lain, para pedagang asing itu mendapat kompensasi terhadap risiko dari ketidakpastian pasar.

Dalam praktiknya, pedagang asing dari bursa berjangka di luar negeri membuat kontrak dagang dengan pedagang pengumpul di Indonesia untuk jangka waktu yang relatif lebih lama. Biasanya pedagang pengumpul tersebut menguasai jaringan pemasaran komoditi di daerah dengan beragam strategi. Misalnya strategi yang dilakukan yakni mencari petani binaan, membuat pola kerjasama pemberian benih dan kredit usaha tani, bahkan sampai dengan melakukan praktik ijon.



\*1) Nurlisa Arfani

Praktik seperti ini sudah berlangsung cukup lama sehingga mengakibatkan sistem perdagangan yang sulit diubah. Kerjasama antara petani, pedagang pengumpul, sampai dengan *wholesaler* sudah sedemikian baik, bahkan hubungan akrab tersebut berlanjut hingga ke bursa berjangka luar negeri yang digunakan sebagai tempat transaksi dengan *end-user* dari komoditi tersebut. Sehingga untuk mengalihkan mata rantai perdagangan komoditi dari bursa berjangka luar negeri ke bursa berjangka Indonesia yang berperan sebagai sarana *price discovery* atau *price maker*-nya, sangat sulit untuk dilakukan.

Dengan skema perdagangan komoditi seperti itu, mustahil petani akan memetik keuntungan jika ada kenaikan harga komoditi di bursa luar negeri dalam waktu singkat. Kondisi ini disebabkan karena petani tidak dapat memantau informasi harga yang terjadi di bursa berjangka luar negeri. Di samping itu, petani pun tidak dapat mengakses rantai pemasaran karena tidak mampu menggantikan fungsi pedagang pengumpul maupun mencari pedagang pengumpul lain yang

menawarkan harga lebih baik. Sebab, harga yang diperoleh petani sudah dipatok berdasarkan kontrak jangka panjang yang dibuat antara *wholesaler* di bursa luar negeri dengan satu pedagang pengumpul atau lebih. Jika harga turun, yang lebih dirugikan adalah petani karena pedagang pengumpul langsung mengaplikasikan harga yang turun tersebut dalam waktu singkat kepada petani.

## Bursa Representatif

Perdagangan berjangka di dalam negeri juga akan semakin dimudahkan jika terdapat informasi pasokan di gudang terdaftar. Akan lebih menguntungkan lagi jika gudang tersebut dekat dengan petani sebagai produsen, dekat dengan pelabuhan, atau jalur distribusi lainnya. Hal ini menghindari adanya upaya spekulasi karena ketidakpastian volume pasokan. Dengan demikian fluktuasi harga yang terbentuk di bursa sebagian besar merupakan masalah fundamental yang dapat diprediksi dengan baik oleh para pelaku pasar. Pada akhirnya pembentukan harga di bursa dapat mengikuti mekanisme *supply and demand* sehingga lebih efisien.

Dengan uraian di atas, jika Indonesia memiliki bursa berjangka komoditi yang representatif maka banyak manfaat yang dapat diperoleh. Seperti, jika terjadi kenaikan harga komoditi di bursa berjangka, petani memiliki posisi tawar tinggi dan memperoleh keuntungan dari pergerakan harga tersebut. Sebaliknya, ketika terjadi penurunan harga, petani maupun pedagang pengumpul dapat langsung mengantisipasinya dengan melakukan lindung nilai- (*hedging*).

Sehingga dengan skema ini, di sisi lain dapat dicegah *capital flight* dan mampu memaksimalkan keuntungan yang diperoleh pelaku pasar di dalam negeri.

Namun seiring dengan itu, tidaklah mudah menciptakan suatu sarana perdagangan yang memenuhi unsur-unsur tadi. Kehadiran bursa berjangka

di dalam negeri adakalanya menjadi pertimbangan bagi pelaku di bursa luar negeri yang selama ini sudah mendapatkan manfaat dari bursa tersebut. Manfaat tersebut diperoleh pedagang asing karena tidak adanya bursa yang dekat dengan lokasi produsen.

Mengutip pernyataan R. Rudy Irawan, dari laman *margin.com* pada saat mempertahankan disertasi pengukuhan gelar doktor dari Institut Pertanian Bogor, 24 September 2014 lalu, yang menggali "Model Bisnis Tambang Timah di Indonesia," disebutkan bahwa bursa yang memperdagangkan timah di luar negeri tidak rela jika bursa timah di Indonesia berkembang karena selama ini mereka sangat nyaman dengan carut-marut industri timah di Provinsi Bangka Belitung. Berbagai jenis timah yang 'bocor' ke luar negeri, di sana didaur ulang dan diberi *branding* dengan punya mereka. Timah tersebut selanjutnya diperdagangkan di London Metal Exchange (LME).

Dengan berkembangnya bursa berjangka komoditi yang ada di dalam negeri saat ini, diharapkan petani kita dapat menjadi tuan di rumah sendiri dan bukan menjadi pelayan. Untuk itu perlu peran aktif dari semua pihak, baik swasta maupun pemerintah.

Langkah yang dapat ditempuh selain menguatkan ketersediaan infrastruktur seperti yang diuraikan di atas, juga dapat dilakukan pengembangan koperasi petani untuk memperkuat posisi tawar petani dan mengembangkan sistem resi gudang- (SRG) untuk mengoptimalkan fungsi gudang komoditi dalam membantu petani maupun pedagang.

Di samping itu, diperlukan penyebaran informasi harga agar setiap pelaku pasar memperoleh informasi yang simetris sebelum melakukan aksi jual-beli. Kondisi ini akan mendukung terjadinya pasar yang sehat dan bersaing. \*) Calon Widyaiswara, Pusdiklat Kamendag

***“Masa depan industri perdagangan berjangka adalah komoditi multilateral.”***

**M**emang bukan perkara mudah untuk menjadikan komoditi multilateral menjadi ‘menu utama’ dalam industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). Kalau pun komoditi multilateral didorong untuk menjadi yang utama, pasti akan sangat berat bagi pelaku industri PBK untuk dapat berjalan.

Itulah antara lain pandangan **Direktur Utama PT. Starpeak Equity Futures (SEF)**, Boy Hendra, saat Buletin Bappebti, menyambangnya di ruang kerjanya di Plaza UOB, Lt. 32, Jln. M.H. Thamrin No. 10 Kav. 8-10, pada medio September lalu.

Sebabnya? “Untuk saat ini, tidak mungkin hanya mengandalkan keuntungan dari transaksi multilateral untuk dapat membiayai *cost* perusahaan pialang. Jujur saja, saat ini ‘dagingnya’ itu bukan di kontrak multilateral,” kata Boy.

Karena itu, rasanya memang wajar jika dikatakan bahwa wajah industri ini masih terbilang redup jika harus berkaca dengan perkembangan industri PBK di negara lain. Hal itu dapat dilihat dari pencapaian transaksi kontrak komoditi multilateral yang masih tersingkir dengan total volume Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) atau dikenal juga transaksi bilateral.

Intinya, pencapaian transaksi kontrak komoditi multilateral belum sesuai dengan Amanat UU PBK untuk menjadikan perdagangan berjangka sebagai sarana lindung nilai (*hedging*) dan pembentukan harga (*price discovery*).

Kendati demikian, Boy, bilang, sebenarnya komoditi multilateral bisa mendatangkan keuntungan yang besar jika mau digarap dengan serius. Masalahnya, untuk menggenjot transaksi multilateral diperlukan sinergitas dengan banyak pihak. “Misalnya saja BUMN (Badan Usaha Milik Negara).”



## **Boy Hendra ‘Chef’ Pialang di Saat Kritis**

Tapi di luar itu, pria kelahiran Padang, 26 September 1973 ini, memiliki gagasan yang cukup menarik untuk mengembangkan kontrak komoditi multilateral di Indonesia. “Ada ‘potongan kue’ yg bisa dikejar. Syaratnya, semua pelaku industri PBK harus dapat bekerjasama,” katanya.

Seperti apa? Dia berpendapat, kontrak multilateral akan tergenjot naik jika semua pelaku industri PBK mampu memanfaatkan relasi yang dimiliki untuk menarik nasabah ke dalam transaksi multilateral.

Gagasan itu sebenarnya lahir dari pengalaman pribadinya sebagai orang daerah yang merantau ke Jakarta. “Saya asli dari daerah Sumatera Barat. Kebetulan saya kenal cukup baik dengan Walikota Payakumbuh, Reza Pahlevi, karena rumahnya yang berdekatan dan adiknya pun teman main saya,” cerita Boy.

Berawal dari kedekatan itu, Alumni Fak. Ekonomi Univ. Andalas, tahun 1996 ini, sempat mengukur potensi sektor pertanian di daerahnya. Payakumbuh merupakan salah satu sentra kakao yang cukup besar. Karena itu, Boy melihat, dengan dukungan walikota, tentu tidak sulit untuk menarik petani atau pelaku usaha kakao di daerahnya agar melakukan hedging di bursa berjangka. “Petani kakao di sana dapat dibentuk menjadi suatu kelompok yang memiliki badan hukum, misalnya koperasi. Sehingga mereka dapat melakukan *hedging* di bursa berjangka,” terangnya.

Masalahnya, Boy mengaku sulit untuk menjabarkan kepada walikota secara detail mengenai *hedging*. Karena itu, dia berharap Bapebti dan bursa berjangka mau mengajarkan kepada dirinya atau perusahaan pialang cara melobi dengan

baik. "Bagaimana 'sih caranya menyampaikan, misalnya ke walikota? Bagaimana pendekatannya? Apa keuntungan buat daerah? Apa keuntungan buat pengusaha? Tolong ajarkan ke kami cara berbicara kepada walikota, bupati, dan lainnya. Kalau sudah diajarkan, selanjutnya kami yang akan membereskan," katanya.

Dengan demikian, Boy berharap, ketika ada undangan pelatihan teknis tentang multilateral, sebaiknya jangan sekedar hanya berbicara dengan nasabah retail. "Potensi nasabah retail seberapa sih? Karena secara bisnis mereka kurang menguntungkan. Berbeda ketika bertemu dengan pemilik kebun, pabrik makanan, dan lainnya. Setiap bulan mereka membutuhkan sekian lot, mereka bisa *hedging* untuk kepastian barang."

Boy juga yakin, banyak para pelaku di industri PBK yang memiliki relasi untuk bisa menggenjot transaksi multilateral. "Kalau saya mungkin hanya walikota, mungkin banyak yang memiliki kenalan dengan gubernur, pemilik kebun, pemilik pabrik makanan, atau lainnya," ungkapnyanya. "Perusahaan pialang pun pasti mau, karena hal itu bisa mendatangkan transaksi yang besar," tambahnya.

## Ditempa Pengalaman

Bergelut di industri PBK bukanlah hal yang baru bagi suami dari Aranya Nadia, ini. Dia mengenal perdagangan berjangka pada awal tahun 1998 di salah satu *commission house*. Setelah itu, dia banyak malang melintang diberbagai perusahaan pialang di Indonesia. Terakhir, Boy berlabuh di PT Golden Financial Future (GFF) yang berubah menjadi SEF.

Satu hal yang sangat menarik dari kisah perjalanan karirnya, Boy mengaku sering masuk ke perusahaan pialang saat perusahaan itu sedang dilanda krisis. "Contoh teranyar di GFF, saya masuk ke perusahaan ini sedang kritis. Istilahnya, kalau kapal mau karam, kelasi-kelasinya sudah hilang duluan, tinggal nahkodanya. Jadi kebagian tinggal tulangnya saja," kata Boy, sembari tersenyum.

Karena itu, mau tidak mau, Boy harus belajar cara menghadapi komplain dari banyak para nasabah. "Dari yang *bule* sampai yang lokal," ujarnya.

Dia juga harus banyak berhubungan dengan Bappebti, lembaga kliring, bursa berjangka, dan lainnya, untuk membenahi permasalahan yang ada di perusahaan itu.

Alhasil, dari permasalahan itu, dia banyak mendapat pelajaran dan pengalaman yang sangat berharga. Hal itu juga yang menempanya menjadi pelaku usaha yang tahan banting.

"Jadi saya pikir, itulah sekolahnya yang mahal, dan tidak ada ditemukan di mana pun. Jaringan kita pun bertambah banyak, istilahnya saya naik kelas, karena sebelumnya hanya berada di level umum," tuturnya.

Lalu, setelah GFF beralih menjadi SEF, April 2012 lalu, Boy dipercaya menjadi Direktur Kepatuhan. Sebenarnya, di awal sebelum SEF belum memiliki kantor, dirinya sudah ada di dalamnya menyusun pembentukan perusahaan. Barulah pada akhir 2013, Boy akhirnya diangkat menjadi Dirut SEF hingga sekarang.

## Registrasi Online

Di bawah kepemimpinan Boy, SEF terus berbenah menjadi pialang terdepan di Indonesia. Dia bilang, SEF merupakan salah satu member Jakarta Futures Exchange (JFX) yang aktif melakukan transaksi multilateral untuk komoditi emas dan olein. "Saat ini transaksi kita melewati target 5 %," ungkapnyanya.

Di sisi lain, saat ini SEF hanya memiliki kantor cabang di Gedung Menara Palma Lantai 16, Jakarta Selatan. "Untuk pengembangan perusahaan, diharapkan registrasi online menjadi alternatif selain membuka cabang di daerah. Itu akan dapat lebih baik, karena sekarang Bappebti membatasi pembukaan kantor cabang pialang di daerah," katanya.

Lainnya, Boy juga mengatakan, pentingnya Sertifikat Wakil Pialang Berjangka (WPB) bagi pelaku industri



PBK. Bahkan, dia sangat ingin semua marketingnya memiliki sertifikat WPB. "Ujian WPB tidak mudah. Mau tidak mau mereka akan dipaksa untuk belajar agar lulus. Karena itu, biasanya mereka akan menyiapkan diri. Jadi, mereka akan lebih memahami bisnis ini dan ketika memiliki WPB, mereka akan memiliki tanggung jawab yg besar."

## Hobi Memasak

Meski fokus dalam dunianya di industri PBK, ayah dari Batara Bumi Mahesa dan Kala Narendra ini, memiliki keinginan pribadi yang cukup menggelitik. Ia ingin membuat sebuah warung makan. Keinginannya itu, bermula dari sebuah hobi yang belum lama ini dia temukan. "Hobi memasak," ungkapnyanya tersenyum.

Dia bilang, "*passion* ini saya temukan belakangan, tujuan awalnya sih memasak untuk menyenangkan anak saja. Mulai dari masak nasi goreng, *spaghetti*, *cake*, *muffin*, dan lainnya."

Di samping hobi memasak, Boy juga suka *fitnes* untuk menjaga kebugaran fisiknya. "Sejak SMP hingga kuliah sebenarnya suka olahraga, mulai dari sepakbola, bulutangkis, tenis, beladiri. Tapi belakangan ini hanya *fitnes* saja," tutupnyanya. 



“Manfaatkan SRG  
dan  
Tingkatkan Kesejahteraan”